

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan transisi energi dan insentif fiskal pemerintah mendorong perubahan strategi bisnis dan finansial PT PLN Persero melalui tekanan institusional berupa isomorfisme koersif, mimetik, dan normatif. Tekanan koersif mendorong PLN untuk menyesuaikan strategi teknis dan finansialnya. Isomorfisme mimetik mendorong adopsi teknologi dari negara lain untuk meningkatkan efisiensi. Sementara itu, isomorfisme normatif mendorong PLN untuk menyesuaikan kebijakan internal dengan standar global pengurangan emisi karbon. Identifikasi isomorfisme institusional menunjukkan enam aspek krusial yang mempengaruhi efektivitas pengembangan EBT di PLN, yaitu insentif fiskal, kebijakan internal PLN, kinerja keuangan PLN, risiko fiskal negara, kebijakan pemerintah, dan iklim investasi. Secara keseluruhan, tekanan koersif memiliki peran dominan dalam mendorong perubahan di PLN yang pada gilirannya juga memicu terjadinya tekanan mimetik. Di sisi lain, efektivitas tekanan normatif dapat melemah apabila kebijakan iklim dan insentif fiskal yang diterapkan pemerintah kurang tegas. Hal ini mengingat PLN masih bergantung pada dukungan finansial pemerintah.
2. Insentif fiskal yang disediakan pemerintah dalam rangka mendorong penggunaan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan pada PT

PLN Persero ada beraneka macam, diantaranya keringanan pajak dan fasilitas impor, kebijakan harga, fasilitas pembiayaan dan penjaminan, serta subsidi energi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran insentif yang diberikan oleh pemerintah belum optimal dalam menurunkan biaya investasi energi baru dan terbarukan. Hal ini terlihat dari biaya pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan pembangkitan listrik dari energi fosil. Apabila kondisi tersebut tidak berubah, maka berpotensi menimbulkan risiko fiskal bagi keuangan negara. Dalam mengatasi tingginya biaya investasi pembangkit energi baru dan terbarukan, PT PLN Persero mengupayakan berbagai sumber pendanaan hijau untuk menunjang proyek EBT. Pemerintah, sebagai regulator, berperan dalam memberikan kepastian melalui pembiayaan dan penjaminan untuk memperoleh biaya pendanaan yang lebih murah. Seiring dengan perkembangan teknologi, diharapkan biaya pembangkit energi baru dan terbarukan akan semakin murah.

3. Kebijakan transisi energi diimplementasikan oleh PT PLN Persero dengan melakukan perubahan pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). RUPTL disusun dengan berlandaskan pada keberlanjutan lingkungan di antaranya memberikan porsi tertinggi pada pembangkit energi baru dan terbarukan. Pada RUPTL 2021-2030, porsi pembangkit EBT mencapai 51,6% dari total proyek pembangkit. Selanjutnya PT PLN Persero sedang menyusun rancangan RUPTL 2025-2034 yang direncanakan mencapai 75% pembangkit merupakan pembangkit yang berbasis energi baru dan terbarukan. Selain itu, kebijakan transisi energi diinternalisasikan oleh PT PLN Persero

dalam wujud pembentukan kerangka tata kelola, pengembangan strategi penyediaan pembangkit listrik, serta perwujudan kebijakan dalam operasional Perseroan. Hingga tahun 2023, PT PLN Persero juga telah merealisasikan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan sebesar 541 pembangkit dengan kapasitas terpasang 4.209,7 MW. Adopsi teknologi pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan juga dilakukan PT PLN Persero untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem pembangkit.

4. Dari aspek keuangan, perubahan yang paling terlihat pada PT PLN (Persero) terjadi pada peningkatan aset tetap. Selain menjalankan kebijakan transisi energi, PT PLN (Persero) juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia. Konsekuensinya, peningkatan aset tetap Perseroan menjadi hal yang wajar seiring dengan upaya ekspansi dan pengembangan infrastruktur kelistrikan. Tingginya biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP TL) tidak secara langsung mempengaruhi keuangan PT PLN Persero. Pemerintah memberikan penjaminan untuk memberikan subsidi-kompensasi terhadap kelebihan BPP TL yang dibayarkan oleh PT PLN Persero. Oleh karena itu, dampak langsung mungkin tidak akan terlihat dalam keuangan PT PLN Persero melainkan pada beban keuangan negara. Aspek yang perlu diantisipasi pada keuangan PT PLN Persero adalah likuiditas Perseroan mengingat modal kerja Perseroan yang rendah.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran insentif fiskal terhadap kinerja keuangan dan pengembangan energi baru dan terbarukan pada BUMN sektor

ketenagalistrikan (PT PLN Persero) ini terdapat beberapa implikasi yang dapat diidentifikasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Institutional Theory* terjadi pada PT PLN Persero dalam melaksanakan kebijakan transisi energi. Aspek-aspek krusial yang berpengaruh dalam pengembangan energi baru dan terbarukan dapat dijelaskan oleh proses isomorfisme (koersif, mimetik, dan normatif).

Penelitian ini menunjukkan bahwa insentif fiskal yang diberikan pemerintah, efektivitasnya masih perlu untuk ditingkatkan agar lebih berdampak pada peningkatan investasi pembangkit listrik energi baru dan terbarukan, serta menurunkan BPP TL PT PLN Persero. Diperlukan sinergi antara pemerintah, PT PLN Persero, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi yang lebih terintegrasi guna memastikan keberlanjutan bisnis PT PLN Persero serta pencapaian target bauran energi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Pada saat melaksanakan penelitian ini, terdapat keterbatasan dalam penelitian antara lain:

1. Dalam mengukur peran insentif fiskal terhadap pengembangan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data yang bersumber dari proses wawancara. Hal ini memungkinkan adanya unsur subjektivitas dalam pernyataan yang disampaikan oleh narasumber. Namun peneliti berusaha untuk menyelaraskan data dengan melakukan triangulasi berbagai sumber data, termasuk penelitian terdahulu yang relevan, serta menyajikan deskripsi yang kaya dan padat tentang hasil penelitian. Selain itu, dalam hal menjaga reliabilitas penelitian, penulis

berupaya menghindari definisi dan makna yang ambigu dalam proses koding sehingga hasil interpretasi data tetap konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Keterbatasan akses terhadap informasi dan data internal proyek Perseroan menjadi salah satu tantangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, analisis dilakukan secara *time series* untuk mengidentifikasi pola serta perkembangan dari tahun ke tahun.
3. Partisipan dalam penelitian ini masih terbatas dan tidak semua pemangku kepentingan dapat diikutsertakan dalam penelitian ini karena keterbatasan waktu.

5.4 Saran

Hasil penelitian memberikan wawasan bagi PT PLN Persero dalam menyusun strategi bisnis yang lebih adaptif terhadap kebijakan transisi energi dan insentif fiskal. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk merancang kebijakan insentif fiskal yang fleksibel dan progresif dengan mempertimbangkan dinamika investasi dan tipe-tipe investor EBT. Kebijakan ini akan mengurangi potensi pemanfaatan insentif yang kurang optimal oleh pengembang. Pengelolaan fiskal negara juga perlu dilaksanakan dengan bijak untuk memastikan penggunaan keuangan negara yang tepat sasaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar negara sehingga pemerintah dapat lebih fokus pada pengendalian isu-isu kontemporer.

Bagi penelitian selanjutnya, dapat menerapkan metode *Cost Breakdown Analysis* untuk mengidentifikasi pengaruh insentif fiskal terhadap pengembangan

pembangkit listrik energi baru dan terbarukan secara kuantitatif. Alat analisis ini akan membantu mengkuantifikasi dampak terhadap biaya investasi apabila terjadi kenaikan/pengurangan insentif fiskal. Selain itu, menambah jumlah partisipan untuk memberikan perspektif yang lebih dalam dan komprehensif.